

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik Vol 14*, -.
- Alifya, A. (2018). *Evaluasi Kebijakan Public Funding pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.
- Anggraini, T. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: Perludem.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Falguera, E., Jones, S., & Ohman, M. (2014). *Funding of Political Parties and Election Campaigns. A Handbook on Political Finance*. Stockholm: International IDEA.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hadi, B. S. (2019, Oktober 1). *KPU DIY sebut kebutuhan anggaran pilkada serentak 2020 terpenuhi*. Retrieved from [antaranews.com](http://antaranews.com): [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)
- Haryanto, Cahyati, D.D., Lapo, Y.H.T. (2018) *Pembiayaan Kampanye Calon Usungan Partai Politik di Pilkada: Kasus Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018*. Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendrarso, E. S. (2007). *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar. Dalam Metode Penelitian Sosial*. Editor Bagong Suyanto dan Sutinah. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imronah. (2009). *Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Retrieved from [neliti.com](http://neliti.com)
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.

- Parson, W. (2011). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Punamasari, D. D. (2020, Oktober 15). *Tren Partisipasi Pemilih Pemilu pada Masa Pandemi Turun*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/15/tren-partisipasi-pemilih-pemilu-di-masa-pandemi-turun/> *kompas.id*:
- Sabatier, P. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy Vol. 6*, 21-48.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, Moh. (2019). *Dinamika Politik dalam Implementasi Kebijakan Kampanye Putaran Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017*. Bandung : Tesis, Universitas Padjadjaran.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publising.
- Wulandari, L. (2019). Evaluasi Penerapan Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 oleh Negara. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, 53-78.
- Yanuarti, S. (2019). Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Penelitian Politik: Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Vol. 16 No. 2*, 209-228.
- Yaqdhan, R. F. (2019). *Efektifitas Kampanye Calon Anggota Legislatif Lampung melalui Alat Peraga Kampanye Resmi*. Lampung: Skripsi, Universitas Lampung.
- Yuliyanto, M. (2014). Evaluasi Alat Peraga Kampanye di Era Demokrasi Elektoral. *Jurnal Ilmu Sosial Vol. 13 No. 1*, 33-41.

## Regulasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/Pl.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.